

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Manfaat penelitian.....	4
D. Kerangka teoritis.....	5
E. Metode penelitian.....	13
<b>BAB II ALASAN PENOLAKAN KLARIFIKASI TERHADAP SEBAGIAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH</b>	
A. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai Produk Hukum yang berlaku mengikat di Daerah.....	19
B. Landasan Yuridis Kewenangan Gubernur dalam Pengawasan terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota.....	25
C. Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Timur .....	30
<b>BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP PERATURAN KEPALA DAERAH YANG TIDAK DIKLARIFIKASI OLEH GUBERNUR</b>	
A. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah.....	37
B. Akibat Hukum bagi Gubernur yang tidak melaksanakan Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.....	42
C. Akibat Hukum bagi Bupati/Walikota yang tidak melaksanakan penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada Gubernur.....	46

D. Akibat Hukum bagi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tidak diajukan klarifikasi oleh Bupati/Walikota.....	49
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	53



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)